

**Content analysis divinity values in textbooks *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn)* subject in senior high school****Rita Angraini<sup>a\*</sup>, Rini Vovriyenti<sup>a</sup>**<sup>a</sup>*Universitas Negeri Padang, Indonesia*<sup>\*</sup>E-mail: [angrainirita15@gmail.com](mailto:angrainirita15@gmail.com)

**Abstract:** This article aims to analyze the content of the First Precept of Belief in One God in the class X Pancasila and Civic Education (PPKn) textbook written by Nuryadi and Tolib from the Ministry of Education and Culture in 2017. Although it is not implicitly stated in the sub-chapter, however, the translation into the form of juridical provisions is relatively more conflicting because it enters the policy process and the state administration system, and therefore intersects with politics, which today are increasingly full of power interests and motivations. Therefore, the utilization of this book as material containing the contents of the First Precepts of Pancasila must be in line with the objectives of Civics itself, especially in the aspect of forming the spiritual attitude and character of citizens. The teacher must ensure that the discussion of material with the value of God is carried out with the main aim of improving the quality of learning.

**Keywords:** Value of god almighty, textbook, civic education

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis muatan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam buku teks mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas X karangan Nuryadi dan Tolib dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Berdasarkan analisis ditemukan hampir semua materi atau konten mengandung muatan nilai Ketuhanan walaupun tidak secara tersirat tertuang dalam sub bab, Namun demikian, penjabaran kedalam bentuk ketentuan yuridis relative lebih konfliktif karena memasuki proses kebijakan dan sistem ketatanegaraan, dan karenanya bersinggungan dengan politik yang dewasa ini semakin penuh dengan kepentingan dan motivasi kekuasaan. Oleh karena itu, pendayagunaan buku ini sebagai materi yang mengandung muatan Sila Pertama Pancasila harus sejalan dengan tujuan PPKn itu sendiri terutama pada aspek pembentukan sikap spritual dan karakter warga negara. Guru harus memastikan bahwa pembahasan materi-materi dengan muatan nilai Ketuhanan dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

**Kata kunci:** Nilai ketuhanan yang maha esa, buku teks, PPKn

**PENDAHULUAN**

Buku teks atau buku ajar merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Buku ini digunakan sebagai panduan yang berisi materi ajar untuk dua semester atau satu tahun bagi siswa maupun guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Henky Guntur Tarigan dan Djago Tarigan (2009: 13-14) menjelaskan bahwa buku teks merupakan buku pegangan atau buku pedoman yang disusun oleh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Hal senada terlihat dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa buku teks pelajaran pada pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Melalui buku teks siswa mampu mencapai standar kompetensi yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Menurut Rizal Zaenal (2015) komponen-komponen dalam sebuah buku teks adalah: 1) petunjuk

belajar (petunjuk siswa atau guru), 2) kompetensi yang akan dicapai, 3) informasi pendukung, 4) latihan-latihan, 5) petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja dan 6) evaluasi. Buku teks juga merupakan komponen penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran, dengan adanya buku teks proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan adanya buku teks akan dapat membantu guru dalam menentukan indikator dan tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, oleh karena itu setiap buku teks harus memiliki tujuan dalam membekali siswa menghadapi berbagai persoalan yang terjadi sekarang ini seperti pengaruh globalisasi yang cenderung menimbulkan permasalahan pada diri siswa, masyarakat, bangsa dan negara, untuk itu sangat penting sebuah buku teks memuat konten atau materi yang dapat membekali siswa dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi pada diri dan lingkungannya seperti konflik yang muncul karena perbedaan agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Greene dan Petty (dalam Tarigan, 2009) menjelaskan bahwa salah satu kriteria buku yang baik adalah buku teks yang mampu membuat siswa memiliki pemahaman dan kerampilan berfikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungannya. Salah satu konflik yang rentan terjadi yakni konflik antar agama, dalam hal ini materi ajar atau buku teks mampu memberikan pemahaman kepada siswa untuk bisa menghargai dan menghormati perbedaan agama yang ada di masyarakat. Toleransi antar umat beragama tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu akan tercampur aduk dengan ajaran agama orang lain. Disadari bahwa agama telah berhasil menembus batas-batas kesukuan, kedaerahan, dan malah batas-batas kebangsaan. Terlihat bahwa agama mempunyai potensi mempersatukan bangsa.

Tulisan ini melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu yang kurang memperhatikan aspek Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Sila Pertama Pancasila pada buku teks pelajaran di tingkat sekolah menengah. Secara khusus tulisan ini menunjukkan bahwa analisis konten buku teks pelajaran yang berisi muatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sangat penting untuk dilakukan dalam mengantisipasi munculnya konflik yang didasarkan pada perbedaan pandangan agama pada masyarakat Indonesia. Salah satu buku teks yang diharapkan memiliki muatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah buku teks mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat pendidikan menengah, oleh karena itu penulis mencoba menganalisis aspek ini dalam mata pelajaran PPKn kelas X.

Tulisan tentang analisis konten buku teks mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X ini didasarkan pada argumen bahwa materi buku ajar ini perlu memuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa baik secara sub bab materi maupun dalam proses kegiatan pembelajaran karena hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang keimanan, keyakinan dan kesadaran kepada peserta didik bahwa penting memiliki rasa toleransi yang tinggi kepada pandangan agama yang berbeda agar tidak memunculkan konflik dalam masyarakat.

## METODE

Artikel ini dikaji menggunakan pendekatan konseptual dengan cara menganalisis buku teks atau buku ajar dengan beberapa artikel, peraturan terkait dan buku-buku yang relevan. Analisis konseptual yang dibangun berdasarkan teori atau pengertian teoritis. Menurut Jon Jonker (2011) menjelaskan: 1) model konseptual merupakan konstruksi verbal atau visual yang membantu untuk membedakan antara apa yang penting dan yang tidak penting, 2) sebuah model menawarkan kerangka kerja yang menggambarkan (secara logis) hubungan kausal antara faktor-faktor yang berkaitan. Model konseptual dapat mempromosikan hal yang masuk akal atau makna dalam situasi tertentu dan 3) model konseptual menciptakan realitas dalam arti pemahaman kolektif karena model ini didasarkan pada bahasa yang berasal dari pengertian teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada warga negara, hal ini dikarenakan PKn adalah program pendidikan yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan, sikap (spiritual dan sosial) dan keterampilan guna mendukung peran aktif mereka dalam masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Dewasa ini PKn memiliki posisi yang strategis dalam menyiapkan warga negara menghadapi dunia global. Cogan (1999) menjelaskan bahwa PKn memiliki peran penting dalam membentuk watak dan karakter warga negara agar mampu bersaing di era global. PKn senantiasa menjadi pengembang utama dalam meningkatkan sistem pendidikan nasional agar siap berpartisipasi menjadi warga negara global dan membekali peserta didik di sekolah dan perguruan tinggi dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional. Tony Wagner (2010) dalam bukunya *"The global achievement gap"* menyatakan bahwa ada tujuh keterampilan yang harus dimiliki peserta didik pada abad 21 yaitu: (1) *critical thinking and problem solving* (2) *collaboration across networks and leading by influence* (3) *agility and adaptability* (4) *initiative and entrepreneurialism* (5) *effective oral and written communication* (6) *accessing and analysis information* and (7) *curiosity and imagination*. Merujuk pada substansi tersebut maka materi ajar dalam buku teks PKn tidak akan

lepas dari isu yang berkaitan dengan abad 21 berbasis teknologi. Pengaruh teknologi akan cenderung berdampak negatif pada generasi bangsa saat ini, oleh karena itu sangat penting dalam materi ajar PKn memuat nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat menumbuhkan sikap religius, saling menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama dalam masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan masa depan hendaklah semua elemen masyarakat bertanggung jawab untuk menyadari bahwa globalisasi menimbulkan konsekuensi dan kita harus siap menghadapinya. Untuk itu pendidikan di era globalisasi harus mampu menjadikan warga global yang memiliki rasa toleransi dan memiliki kesadaran untuk menerima keberagaman budaya dan agama melalui perbuatan yang demokratis dan PKn juga harus siap membuat individu menjadi warga global yang adaptif terhadap isu-isu global serta memiliki nilai-nilai demokratis, mampu berfikir kritis dan reflektif serta mau berpartisipasi dalam masyarakat. Untuk itulah sangat penting konten yang ada dalam buku teks atau buku ajar dapat membekali siswa dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan menghadapi tantangan abad ini. Salah satu tantangannya adalah memunculkan sikap toleransi antar umat beragama agar tidak menimbulkan konflik yang dipicu oleh perbedaan dalam hal keyakinan. Pada era globalisasi ini cukup rentan munculnya konflik yang disebabkan perbedaan agama, budaya, suku dan lainnya.

Pancasila merupakan nilai-nilai nyata yang bersumber dari realitas masyarakat Indonesia yang berasal dari adat istiadat, kebudayaan serta keyakinan yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat. Nilai-nilai ini tumbuh dan berkembang sebagai pedoman tingkah laku dari pola pikir masyarakat Indonesia. Pancasila akan nyata keberadaannya bila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pancasila setidaknya mengandung tiga makna yakni : Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia, Pancasila sebagai identitas hukum nasional, Pancasila menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum nasional Selain itu dasar pemikiran ini Pancasila bukan hanya sebagai norma dasar pembentukan hukum namun juga sebagai norma kesusilaan dan norma moral. Sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila harus dijadikan sebagai landasan atau fundamental dari aktivitas masyarakat sebagaimana dalam Pancasila terkandung norma norma moral kesusilaan, kesopanan, etika, dan norma lainnya.

Adapun butir-butir sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah: 1) Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2) Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3) Saling hormat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain (TAP MPR No. II/MPR/1978).

Butir-butir sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut hendaknya terimplementasi dengan baik dan benar dalam kehidupan masyarakat Indonesia agar terwujud kedamaian dan ketentraman di dalam keberagaman yang nyata ada ditengah-tengah masyarakat. Keberagaman ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang multikultural. Konsep multikultural mengandung dua gagasan yakni pertama, gagasan vertikal mencakup aspek ekonomi dan pendidikan dan kedua, gagasan horizontal mencakup perbedaan agama, suku, budaya, ras, bahasa dan lain sebagainya. Segala perbedaan ini bukan tidak mungkin akan memunculkan konflik, oleh karena itu penting pemahaman yang utuh terkait perbedaan yang ada dalam masyarakat sehingga perbedaan yang ada merupakan aspek pemersatu bangsa bukanlah dijadikan sebagai pemecah belah persatuan bangsa Indonesia.

Penjabaran materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SMA/ MA/SMK/MAK Kelas X Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 karangan Nuryadi dan Tolib yaitu secara rinci sebagai berikut:

1. BAB I Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara meliputi: 1) Sistem Pembagian Kekuasaan NRI; 2) Kedudukan dan Fungsi Kementerian NRI dan Lembaga Pemerintahan No- Kementerian; 3) Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. BAB 2 Ketentuan UUD NRI 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara meliputi: 1) Wilayah NKRI; 2) Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia; 3) Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia; 4) Sistem Pertahanan dan Keamanan NRI
3. BAB 3 Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NKRI 1945 meliputi: 1) Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia; 2) Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945; 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 4) Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik Indonesia
4. BAB 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah meliputi: 1) Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI; 2) Kedudukan dan Peran Pemerintahan Pusat; 3) Kedudukan dan Peran Pemerintahan Daerah; 4) Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah.

5. BAB 5 Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika meliputi: 1) Kebhinekaan Bangsa; 2) Pentingnya Konsep Integrasi Nasional; 3) Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional; 4) Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI; 5) Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. BAB 6 Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika meliputi: 1) Ancaman terhadap Integrasi Nasional; 2) Ancaman di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM; 3) Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional
7. BAB 7 Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara KRI meliputi: 1) Wawasan Nusantara; 2) Kedudukan Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara; 3) Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara; 4) Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan.

Dari materi- materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X di atas dapat dilihat muatan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah:

Pada Bab 1 Sub Bab B dari Buku PPKn Kelas X, pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Pemerintahan Negara senantiasa berpotensi untuk menjadi pemicu pembahasan mengenai konflik terutama dari perspektif *das sein* versus *das sollen*. Seringkali nilai-nilai dasar dianggap terlalu filosofis, dan nilai-nilai praksis dianggap terlalu kasuistik. Namun tidak demikian halnya dengan nilai-nilai instrumental yang diambil dari amanat konstitusi. Hak dan kewajiban warga negara yang digariskan konstitusi sebagai *das sollen* bersifat mengikat sehingga dapat dijadikan basis untuk menggugat kondisi *das sein* sebagai inkonstitusional. Berlanjut pada Bab 2 sub bab C terkait kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, dalam hal ini penting sekali guru memberikan pemahaman secara praktik maupun secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan terkait kebebasan masyarakat Indonesia dalam memeluk dan melaksanakan keyakinan sesuai ajaran masing-masing tanpa adanya paksaan karena kebebasan ini dijamin oleh negara.

Berlanjut pada Bab 3, terkait kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 ini akan memunculkan pandangan dari siswa betapa pentingnya pemahaman agama yang baik bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat. Demikian pula tentang contoh-contoh kasus Korupsi yang semakin banyak terjadi sangat penting fondasi keimanan dan ketakwaan bagi setiap individu sehingga dalam berfikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang anut. Konflik dari perspektif *das sein* versus *das sollen* dalam Bab 5 ini juga dapat muncul pada Sub Bab D mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Hal ini terutama dapat dibangkitkan melalui pembahasan aspek menjaga keutuhan NKRI yang akan lebih banyak mengangkat faktor-faktor pembentuk Integrasi nasional. Mungkin sekali siswa akan menuntut porsi yang lebih besar pada aspek pencegahan ketimbang penanganan, serta peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terkait perbedaan agama yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Bab 6 ini dapat dikatakan sebagai bab yang paling lekat dengan keseharian siswa karena membahas ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika yang saat ini berupa pengaruh teknologi yang diakrabi oleh generasi muda. Potensi muatan nilai ketuhanan di dalam tema ini luar biasa kaya, sehingga sangat boleh jadi justru kelas akan mengalami kesulitan guna memilih topik yang bisa membangkitkan antusiasme dan perhatian siswa. Oleh sebab itu sangat disarankan agar guru mempelajari terlebih dahulu tren aktual yang berkembang di dunia maya dan mencocokkan dengan materi yang akan dibahas di kelas terkait pandangan dan implikasi nilai Ketuhanan di era abad ini yang berbasis teknologi. Adapun kontradiksi yang paling umum diangkat dalam hal ini adalah manusia versus mesin, kemudahan versus kemandirian, serta tren versus tradisi. Muatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam bab terakhir yakni bab 7 terkait wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bab ini akan menyamakan pandangan siswa terkait peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara yang berdasarkan pada UUD NKRI 1945 dan Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai Ketuhanan yang merupakan pondasi dalam mewujudkan nilai-nilai lainnya.

## SIMPULAN

Pada dasarnya hampir semua konten dalam buku ini sebenarnya dapat mendukung muatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai contoh menonjol yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat maupun daerah, kenyataan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan mendapat pembahasan secara khusus menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berpotensi melanggarnya masih ada dan akan ada hingga masa mendatang. Aspek nilai Ketuhanan dalam hal ini secara sederhana terletak pada pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Demikian pula, penjabaran nilai-nilai instrumental Pancasila sebenarnya memiliki potensi konflik inheren yang lebih rumit dari pada nilai praksis. Pada faktanya praksis Pancasila lebih fleksibel untuk diselaraskan karena sifat dasar

Pancasila yang mampu melandasi begitu banyak golongan dan perbedaan. Namun demikian, penjabaran kedalam bentuk ketentuan yuridis relative lebih konflikatif karena memasuki proses kebijakan, dan karenanya bersinggungan dengan politik yang dewasa ini kian penuh dengan kepentingan dan motivasi kekuasaan. Oleh karena itu, pendayagunaan buku ini sebagai muatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar tidak kontra produktif terhadap tujuan PPKn itu sendiri terutama pada aspek pembentukan sikap spritual dan sosial. Guru harus memastikan bahwa pembahasan materi-materi konflikatif dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pembelajaran.

## REFERENSI

- Cogan, J. J. (1999). *Developing The Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Jonker. J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muqodas, Rizal, Z. dkk. (2015). Desain dan Pembuatan Bahan Ajar Berdasarkan Pendekatan Saintifik pada Mata Pelajaran Sistem dan Instalasi Refrigerasi, *Journal Of Mechanical Engineering Education*, Vol. 2, No. 1.
- Nuryadi Dan Tolib (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku Teks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku.
- Tarigan, H. G. Dan Djago. T. ( 2009). *Telaah Buku Teks Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang 36 Butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Tony Wagner. (2010). *The Global Achievement Gap*. New York: Basic Books